



2021

LAPORAN KEUANGAN

ASERSI FINAL

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN



UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta, April 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian


Airlangga Hartarto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ix
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
II. NERACA	6
III. LAPORAN OPERASIONAL	7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
A. PENJELASAN UMUM	9
A.1. DASAR HUKUM	9
A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	9
A.3. RENCANA STRATEGIS	12
A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	17
A.5. DASAR PENGUKURAN	18
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI	18
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	29
B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	29
B.2. BELANJA NEGARA	31
B.2.1. BELANJA PEGAWAI	32
B.2.2. BELANJA BARANG	33
B.2.3. BELANJA MODAL	35
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	35
C.1. ASET LANCAR	35
C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	36
C.1.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	36
C.1.3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA	36
C.1.4. PIUTANG BUKAN PAJAK	37
C.1.5. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK	37

C.1.6.	BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI	37
C.1.7.	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI	37
C.1.8.	PERSEDIAAN	38
C.2.	ASET TETAP	38
C.2.1.	PERALATAN DAN MESIN	38
C.2.2.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	40
C.2.3.	ASET TETAP LAINNYA	41
C.2.4.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	41
C.3.	ASET LAINNYA	41
C.3.1.	ASET TAK BERWUJUD	42
C.3.2.	ASET LAIN-LAIN	42
	Mutasi atas kenaikan saldo aset lain-lain tahun 2021 adalah sebagai berikut:	43
C.3.3.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	44
C.4.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	44
C.4.1.	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	44
C.4.2.	UANG MUKA DARI KPPN	45
C.4.3.	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	45
C.5.	EKUITAS	45
D.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	46
D.1.	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	46
D.2.	BEBAN PEGAWAI	46
D.3.	BEBAN PERSEDIAAN	47
D.4.	BEBAN BARANG DAN JASA	47
D.5.	BEBAN PEMELIHARAAN	49
D.6.	BEBAN PERJALANAN DINAS	49
D.7.	BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	50
D.8.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	50
D.9.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	51
D.10.	KEGIATAN NON OPERASIONAL	51
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	53
E.1.	EKUITAS AWAL	53
E.2.	SURPLUS (DEFISIT) LO	53

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	53
E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH EKUITAS	53
E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	53
E.6. EKUITAS AKHIR	54
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	55
F.1. REKENING PEMERINTAH	55
F.2. REALISASI PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021	55
F.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	56
F.3.1. LELANG BARANG MILIK NEGARA	56
F.3.2. TRANSFER KELUAR	56
F.3.3. REVISI DIPA PAGU ANGGARAN	56
F.3.4. INFORMASI HIBAH LUAR NEGERI	57
LAMPIRAN PENDUKUNG	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	26
Tabel 4 Masa Manfaat Aset Tetap	27
Tabel 5 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	28
Tabel 6 Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2021	29
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021	30
Tabel 8 Perbandingan Rincian Realisasi PNBPN 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	30
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2021	31
Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021	31
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	32
Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	33
Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	34
Tabel 14 Belanja barang untuk Penanganan Pandemi Covid 19	34
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	35
Tabel 16 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	36
Tabel 17 Rincian Persediaan	38
Tabel 18 Rincian Aset Tetap	38
Tabel 19 Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin	39
Tabel 20 Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin	40
Tabel 21 Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin	40
Tabel 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021	41
Tabel 23 Rincian Transaksi Aset tak Berwujud Tahun 2021	42
Tabel 24 Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021	43
Tabel 25 Mutasi Aset Lain-Lain	43
Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021	44
Tabel 27 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	45
Tabel 28 Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	46
Tabel 29 Rincian Beban Pegawai	47
Tabel 30 Rincian Beban Persediaan	47
Tabel 31 Rincian Beban Barang dan Jasa	48

Tabel 32 Rincian Barang Jasa Penanganan Pandemi	49
Tabel 33 Rincian Beban Pemeliharaan	49
Tabel 34 Rincian Beban Perjalanan Dinas	50
Tabel 35 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	51
Tabel 36 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	51
Tabel 37 Rincian Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	52
Tabel 38 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Monitoring dan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP Atas Laporan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian s.d 31 Desember 2021
Lampiran II	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran III	Laporan Pendukung



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, April 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Airlangga Hartarto



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT**

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2021 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.



Jakarta,
Inspektur

April 2022

Mirza S. Mashudi

EXECUTIVE SUMMARY

RINGKASAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disesuaikan dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.162.464.429,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp386.793.046.903,00 atau sebesar 97,75% dari alokasi anggaran sebesar Rp395.696.324.000,00.

Ringkasan perbandingan Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Negara dan Hibah	-	1.162.464.429		-	264.677.956	-
2	Belanja Negara	395.696.324.000	386.793.046.903	97,75%	421.095.548.000	406.114.336.588	96,44%

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per tanggal pelaporan. Nilai Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.269.806.992,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp710.395.785,00, Aset Tetap sebesar Rp20.606.701.257,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp2.952.709.950,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp5.153.692.713,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Adapun jumlah Ekuitas adalah sebesar Rp19.116.114.279,00.

Ringkasan perbandingan Neraca per 31 Desember 2021 dengan Neraca 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-21	31-Dec-20	Rp	%
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar	710.395.785	748.721.003	(38.325.218)	(5,12%)
Aset Tetap	20.606.701.257	21.875.723.741	(1.269.022.484)	(5,80%)
Aset Lainnya	2.952.709.950	3.837.962.573	(885.252.623)	(23,07%)
Jumlah Aset	24.269.806.992	26.462.407.317	(2.192.600.325)	(8,29%)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	5.153.692.713	5.102.000.765	51.691.948	1,01%
Ekuitas Dana			0	
Ekuitas	19.116.114.279	21.360.406.552	(2.244.292.273)	(10,51%)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	24.269.806.992	26.462.407.317	(2.192.600.325)	(8,29%)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp544.845.112.240,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp544.845.112.240,00. Terdapat surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp815.481.562,00. Sedangkan untuk Pos-Pos Luar Biasa bersaldo nihil, sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp544.029.630.678,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp21.360.406.552,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp544.029.630.678,00, dikurangi koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp66.669.695,00, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp541.852.008.100,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp19.116.114.279,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per tanggal 31 Desember 2021, diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Kemenko Perekonomian juga mengungkapkan pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, dan beban terkait penanganan pandemi COVID-19 dalam CaLK untuk memberikan informasi yang lebih detail bagi pengguna laporan keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-21		% thd Angg	31-Dec-20
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1		1.162.464.429	-	264.677.956
JUMLAH PENDAPATAN			1.162.464.429	-	264.677.956
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	106.114.146.000	105.392.362.716	99,32%	97.072.256.965
Belanja Barang	B.2.2	280.335.133.000	272.861.812.750	97,33%	295.345.903.008
Belanja Modal	B.2.3	9.247.045.000	8.538.871.437	92,34%	13.696.176.615
JUMLAH BELANJA		395.696.324.000	386.793.046.903	97,75%	406.114.336.588

- Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp386.793.046.903,00 atau sebesar 97,75% dari total pagu anggaran setelah dikurangi pengembalian belanja.
- Sedangkan realisasi belanja pada 31 Desember 2020 adalah Rp406.114.336.588,00 atau sebesar 96,44% dari pagu anggaran Rp421.095.548.000,00.



Jakarta, April 2022
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

(Signature)
Airlangga Hartarto

II. NERACA

NERACA
PER 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(Dalam.Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-21	31-Dec-20
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	50.288.257	78.359.727
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.3	102.210.630	35.646.813
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	88.570.238	558.674
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.5	(442.851)	(2.793)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan			
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6	-	46.000.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar TP/TGR	C.1.7	-	(230.000)
Persediaan	C.1.8	469.769.511	588.388.582
JUMLAH ASET LANCAR		710.395.785	748.721.003
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	83.623.800.130	78.465.371.778
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.2	2.092.285.347	2.078.674.827
Aset Tetap Lainnya	C.2.3	547.639.287	842.598.787
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.4	(65.657.023.507)	(59.510.921.651)
JUMLAH ASET TETAP		20.606.701.257	21.875.723.741
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	9.028.538.427	17.050.923.442
Aset Lain-Lain	C.3.2	13.144.604.725	9.646.100.004
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(19.220.433.202)	(22.859.060.873)
JUMLAH ASET LAINNYA		2.952.709.950	3.837.962.573
JUMLAH ASET		24.269.806.992	26.462.407.317
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	5.149.007.713	5.099.815.438
Uang Muka dari KPPN	C.4.2	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.3	4.685.000	2.185.327
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		5.153.692.713	5.102.000.765
EKUITAS	C.5		
Ekuitas	C.5	19.116.114.279	21.360.406.552
JUMLAH EKUITAS		19.116.114.279	21.360.406.552
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.269.806.992	26.462.407.317



Jakarta, April 2022
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Airlangga Hartarto

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-21	31-Dec-20
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNBPN Lainnya	D.1		299.900
JUMLAH PENDAPATAN			299.900
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	105.227.710.960	97.588.418.163
Beban Persediaan	D.3	4.732.239.494	5.274.974.005
Beban Barang dan Jasa	D.4	323.965.848.155	335.984.893.432
Beban Pemeliharaan	D.5	17.115.089.880	17.887.163.923
Beban Perjalanan Dinas	D.6	82.238.673.327	77.380.028.857
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.7	1.312.758.326	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	10.252.582.040	10.774.670.047
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	210.058	(460.419)
Beban Lain-Lain			
JUMLAH BEBAN		544.845.112.240	544.889.688.008
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(544.845.112.240)	(544.889.388.108)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar		806.569.611	114.751.527
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.911.951	84.017.640
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		815.481.562	198.769.167
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(544.029.630.678)	(544.690.618.941)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa			
SURPLUS/DEFISIT LO		(544.029.630.678)	(544.690.618.941)



Jakarta, April 2022
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Airlangga Hartarto

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-21	31-Dec-20	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
EKUITAS AWAL	E.1	21.360.406.552	44.904.967.550	(23.544.560.998)	(52,432)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(544.029.630.678)	(544.690.618.941)	660.988.263	(0,121)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(66.669.695)	-	(66.669.695)	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		(142.268.695)	-	(142.268.695)	-
Koreksi Lain-Lain		75.599.000	-	75.599.000	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	541.852.008.100	521.146.057.943	20.705.950.157	3,973
KENAIKAN PENURUAN EKUITAS		(2.244.292.273)	(23.544.560.998)	21.300.268.725	(90,468)
EKUITAS AKHIR	E.6	19.116.114.279	21.360.406.552	(2.244.292.273)	(10,507)



Jakarta, April 2022
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Airlangga Hartarto

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

Entitas

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.5/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Profil

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Oktober 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN). Seiring dengan pergantian Pemerintahan, nama Kementerian

juga ikut beberapa kali berubah. Nama "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian" sendiri baru dimulai pada tahun 2000.

Pada tahun 2020 terdapat pergantian kabinet yang baru dan menyebabkan perubahan pada struktur kelembagaan pemerintah pusat. Proses penataan organisasi pun dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk menyesuaikan rekomendasi restrukturisasi organisasi, berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatur peranan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian;
- d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

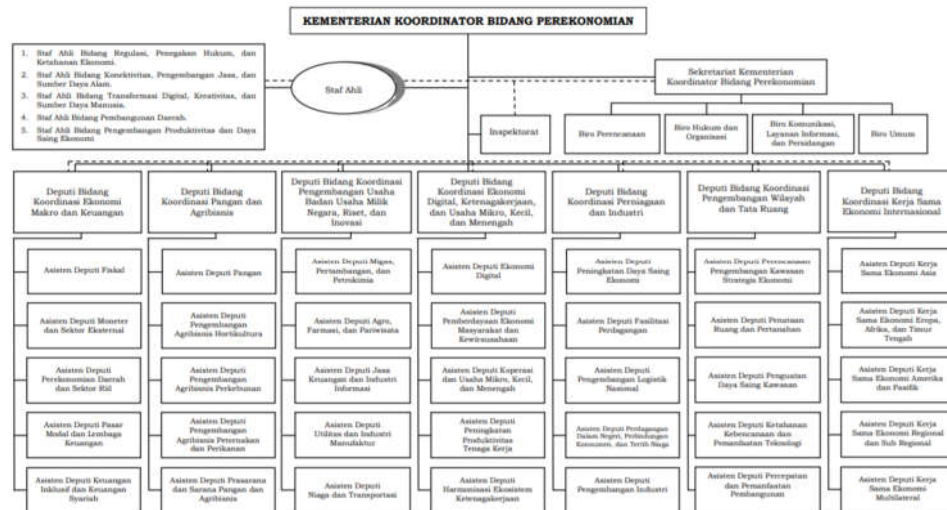
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2021 sesuai hal tersebut di atas, maka diperlukan turunan peraturan dimaksud untuk mengatur kelembagaan internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini terwujud dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan tanggal 28 Oktober 2021. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatur struktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- h. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- i. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi;
- j. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam;
- k. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia;

- l. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
- m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi; dan
- n. Inspektorat.

Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A.3. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2021-2024 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2021-2024 adalah **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Mengacu pada visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan visi Kementerian sebagai berikut.

“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Pembangunan ekonomi dalam mewujudkan visi-misi Presiden diharapkan dapat diselenggarakan melalui perluasan kesempatan dan akses pada seluruh rakyat Indonesia dalam berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan serta peningkatan produktivitas perekonomian dengan tetap memperhatikan kesinambungan antar

generasi. Visi tersebut menjadi landasan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian, serta berfokus dalam mewujudkan sinergi antar Kementerian/Lembaga di bidang perekonomian untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan di bidang perekonomian dalam RPJMN tahun 2021 - 2024.

Visi Presiden-Wakil Presiden 2021-2024 tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden-Wakil Presiden yang meliputi:

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**
- 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**
- 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan**
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**
- 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa**
- 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya**
- 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga**
- 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan**

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan Misi Kementerian sebagai berikut:

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke 1, 2, 3, dan 4, sebagai Koordinator dalam Pelaksanaan Inisiatif dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian dalam rangka:

- 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;**
- 2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;**
- 3. Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan**
- 4. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian.**

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dicapai melalui Misi/Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Koordinator Kementerian Teknis di bidang perekonomian dalam mewujudkan 4 (empat) sasaran pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan daya saing ekonomi.

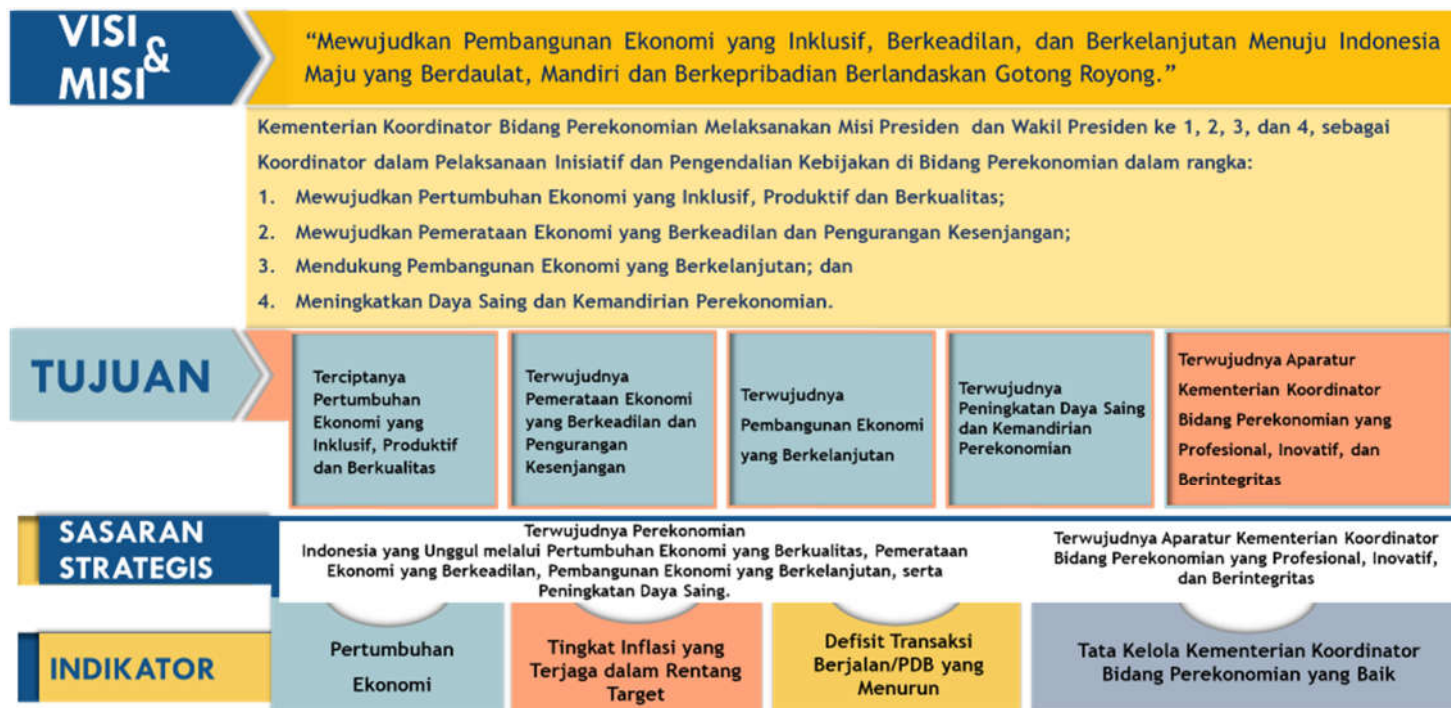
Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

1. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;
2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;
3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
4. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian;
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dari visi, misi, dan tujuan diatas terdapat kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diantaranya:

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.	Pertumbuhan Ekonomi
2.	Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan		Tingkat Inflasi yang Terjaga dalam Rentang Target
3.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan		Defisit Transaksi Berjalan/PDB yang Menurun
4.	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian		
5.	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik



Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS

Selama periode Tahun Anggaran 2021, output strategis yang telah dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran Target Volume Keluaran	Target Volume Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Persentase Realisasi Volume Keluaran
Program Koordinasi Pelaksanaan kebijakan	2519. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri	PBK.001. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	784.929.000,00	784.393.149,00	99,93%	1,00	1,00	100%
		PBK.002. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor	543.831.000,00	542.565.145,00	99,77%	1,00	1,00	100%
		PBK.003. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	449.240.000,00	447.019.028,00	99,51%	1,00	1,00	100%
	2521. Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan	PBB.001. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	500.000.000,00	499.551.052,00	99,91%	1,00	1,00	100%
		PBB.002. Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional	500.000.000,00	499.831.266,00	99,97%	1,00	1,00	100%
	4545. Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	PBK.001. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	1.000.000.000,00	995.462.880,00	99,55%	1,00	1,00	100%
	4550. Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	PBK.001. Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta kerja	13.000.000.000,00	12.922.400.837,00	99,40%	1,00	1,00	100%

A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk tingkat pelaporan Eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Untuk periode pelaporan di tahun anggaran 2021, satuan kerja yang dicakup dalam Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi dua satuan kerja, yaitu Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) dan Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755), yang keduanya dikonsolidasikan dalam satu unit pelaporan tingkat Eselon I pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan digunakan basis akuntansi akrual untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, adapun untuk Laporan Realisasi Anggaran menggunakan akuntansi berbasis kas.

A.5. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan metode FIFO. Pada metode FIFO, persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan masuk persediaan.

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan public yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Aset Tetap

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 September 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian,

pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Pada tahun 2020, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan untuk penyempurnaan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai aset tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2020 sesuai mekanisme yang berlaku.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang dibatasi penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangundangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek

meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5 %
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10 %
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50 %
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100 %

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada PMK Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 30 September 2013 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 30 September 2013, sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 30 September 2013, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa

Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

(10) Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi barang milik negara berupa Aset Tak Berwujud adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Kebijakan amortisasi Aset Tak Berwujud didasarkan pada PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan terhadap Perangkat Lunak (*software*) komputer, Lisensi, Waralaba (*franchise*), Hak Cipta (*copyright*), dan Hak Paten.

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

- Aset tak berwujud dalam kondisi usang/atau rusak berat, serta telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya; dan
- Aset tak berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah serta telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang, untuk dilakukan penghapusannya.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KMK.06/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, <i>Merk</i> , Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Kemenko Bidang Perekonomian telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 9 kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp443.334.438.000,00 setelah revisi terakhir menjadi Rp395.696.324.000,00. Adanya *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L dalam rangka penanganan Covid-19 mendorong seluruh K/L untuk menyisir kembali kegiatan-kegiatan dan/atau belanja yang tidak menjadi prioritas di masa pandemi untuk digunakan penanganan Covid-19. Berikut ini adalah perubahan revisi terkait dengan pagu anggaran Kemenko Bidang Perekonomian:

Tabel 6
Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2021

Uraian	2021	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	118.467.257.000	106.114.146.000
Belanja Barang	319.140.111.000	280.335.133.000
Belanja Modal	5.727.060.000	9.247.045.000
Jumlah Belanja	443.334.428.000	395.696.324.000

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp12.353.121.000,00, dan belanja barang sebesar Rp38.804.978.000,00 serta penambahan belanja modal sebesar Rp3.519.985.000,00.

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.162.464.429,00, tidak terdapat estimasi pendapatan yang ditetapkan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2021. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Rincian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp1.162.464.429

9

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.030.819.404	-
2	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara		46.000.000	
2	Pendapatan dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu		190.051	
3	Pendapatan dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	-	85.454.974	
Jumlah		-	1.162.464.429	-

Realisasi PNPB per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.162.464.429,00 atau naik sebesar 546,97% dibandingkan realisasi PNPB pada 31 Desember 2020. Perbandingan realisasi PNPB disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8
Perbandingan Rincian Realisasi PNPB
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31-Dec	31-Dec	Kenaikan (Penurunan)	
		TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	1.030.819.404	130.101.089	900.718.315	692,32%
2	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian negara	46.000.000	7.725.000	38.275.000	495,47%
3	Pendapatan Denda	-	299.900	(299.900)	(100,00%)
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	190.051	4.452.990	(4.262.939)	(95,73%)
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	85.454.974	122.098.977	(36.644.003)	(30,01%)
Jumlah		1.162.464.429	264.677.956	897.786.473	339,20%

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut

- Pendapatan dari pemindahtanganan BMN merupakan penerimaan atas penjualan 1 paket barang inventaris sesuai risalah lelang nomor 106/25/2021 tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp939.819.405,00 dan penjualan 1 paket peralatan mesin sesuai risalah lelang nomor 454/25/2021 tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp90.999.999,00.
- Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara sebesar Rp46.000.000,00.
- Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL atas pembayaran kekurangan gaji pegawai tahun 2020 sebesar Rp190.051,00.
- Penerimaan kembali belanja barang TAYL terdiri atas honor tim, perjadi, PPNP, honor narasumber serta temuan APIP sebesar Rp85.454.974,00

B.2.BELANJA NEGARA

*Realisasi Belanja
Negara
Rp386.793.046.903*

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp386.793.046.903,00 atau mencapai 97,75% dari alokasi anggaran sebesar Rp395.696.324.000,00. Realisasi belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi belanja dari transaksi kas, setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp2.162.398.656,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 berdasarkan program dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2021

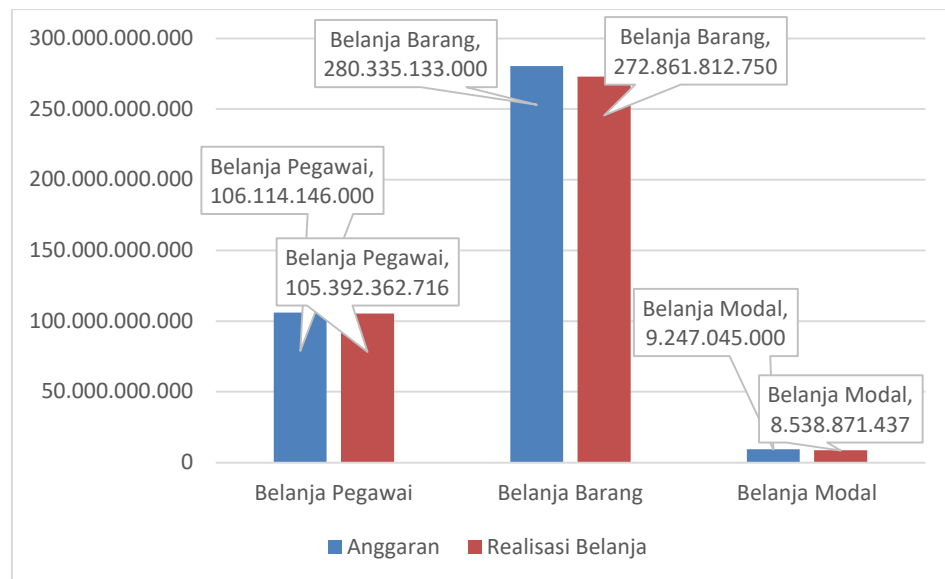
Kode Program	Uraian Program	Anggaran	Realisasi Belanja Netto	(%)	Pengembalian Belanja
WA	Program Dukungan Manajemen	226.895.095.000	223.484.045.307	98,50%	83.850.390
CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	168.801.229.000	163.309.001.596	96,75%	2.078.548.266
Jumlah		395.696.324.000	386.793.046.903	97,75%	2.162.398.656

Realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 31 Desember 2021, seluruhnya bersumber dari dana Rupiah Murni sebesar Rp386.793.046.903,00. Berdasarkan jenis belanja, rincian anggaran dan persentase realisasi terhadap anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2021**

Kode	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	%
51	Belanja Pegawai	106.114.146.000	105.392.362.716	721.783.284	99,32%
52	Belanja Barang	280.335.133.000	272.861.812.750	7.473.320.250	97,33%
53	Belanja Modal	9.247.045.000	8.538.871.437	708.173.563	92,34%
Jumlah Belanja		395.696.324.000	386.793.046.903	8.903.277.097	97,75%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja periode Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Persentase realisasi atas jenis belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 31 Desember 2021 paling tinggi adalah belanja pegawai yakni 99,32% atau sebesar Rp105.392.362.716,00 dari pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp106.114.146.000,00. Adapun untuk belanja barang terealisasi senilai 97,33% atau sebesar Rp272.861.812.750,00, sedangkan belanja modal sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi 92,34% atau sebesar Rp8.538.871.437,00.

Perbandingan realisasi belanja pada periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)	
		31-Dec TA 2021	31-Dec TA 2020
51	Belanja Pegawai	105.392.362.716	97.072.256.965
52	Belanja Barang	272.861.812.750	295.345.903.008
52	Belanja Modal	8.538.871.437	13.696.176.615
Jumlah		386.793.046.903	406.114.336.588

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai
Rp105.392.362.71
6

Pada periode anggaran sampai dengan 31 Desember 2021, pagu Belanja Pegawai telah terealisasi sebesar 99,32% atau sebesar Rp105.392.362.716,00 dari pagu sebesar Rp106.114.146.000,00. Nominal pagu dan realisasi terbesar pada Belanja Pegawai adalah kelompok belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito yang digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai, yang terealisasi sebesar 99,65% dari total pagu kelompok belanja dimaksud.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020, dengan capaian masing-masing sebesar Rp105.392.362.716,00 dan Rp97.072.256.965,00 atau naik sebesar 8,57%. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dikarenakan terdapat penerimaan pegawai baru pada tahun 2021. Adapun Pengembalian Belanja Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp49.975.737,00 dan Rp52.519.406,00. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kelompok Belanja	Uraian	31-Dec-21			Realisasi 31 Des	Perbandingan Realisasi	
		Pagu	Realisasi	%	Tahun 2020	Naik (turun)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	41.014.193.000	40.613.894.780	99,02%	35.710.603.376	4.903.291.404	13,73%
5115	Belanja Gaji dan Tunj Pegawai Non PNS	266.875.000	262.500.000	98,36%	227.500.000	35.000.000	
5122	Belanja Lembur	134.285.000	93.177.000	69,39%	113.520.000	(20.343.000)	(17,92%)
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	64.698.793.000	64.472.766.673	99,65%	61.073.152.995	3.399.613.678	5,57%
Pengembalian Belanja Pegawai			(49.975.737)	-	(52.519.406)	2.543.669	(4,84%)
Jumlah Kelompok Belanja Pegawai		106.114.146.000	105.392.362.716	99,32%	97.072.256.965	8.320.105.751	8,57%

B.2.2. BELANJA BARANG

*Realisasi Belanja
Barang
Rp272.861.812.750*

Pada periode 31 Desember 2021, pagu Belanja Barang telah terealisasi sebesar 97,33% atau sebesar Rp272.861.812.750,00 dari pagu sebesar Rp280.335.133.000,00.

Persentase realisasi terbesar pada Belanja Barang terdapat pada kelompok akun Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp6.433.423.230,00 atau 99,33% dari total pagu kelompok akun Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp6.477.049.000,00. Persentase realisasi terbesar kedua Belanja Barang merupakan kelompok akun Belanja Pemeliharaan yang terealisasi sebesar 98,97% atau sebesar Rp18.055.386.888,00 dari pagu sebesar Rp18.242.597.000,00.

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2021 jika dibandingkan 31 Desember 2020, dengan capaian realisasi masing-masing adalah sebesar Rp272.861.812.750,00 dan Rp295.345.903.008,00. Perbandingan persentase penurunan realisasi yang paling besar terdapat pada belanja barang non operasional yakni 27,34% atau sebesar Rp6.552.793.901,00.

Adapun Pengembalian Belanja Barang pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp2.112.422.919,00 dan Rp596.556.260,00. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kelompok Belanja	Uraian	31-Dec-21			Realisasi 31 Desember 2020	Perbandingan Realisasi	
		Pagu	Realisasi	%		Naik (turun)	%
5211	Belanja Barang Operasional	16.377.125.000	16.094.060.344	98,27%	11.177.657.070	4.916.403.274	43,98%
5212	Belanja Barang Non Operasional	18.081.328.000	17.414.307.541	96,31%	23.967.101.442	(6.552.793.901)	(27,34%)
5218	Belanja Barang Persediaan	5.230.563.000	5.020.046.657	95,98%	5.710.984.376	(690.937.719)	(12,10%)
5221	Belanja Jasa	137.350.873.000	135.844.159.004	98,90%	159.033.112.703	(23.188.953.699)	(14,58%)
5231	Belanja Pemeliharaan	18.242.597.000	18.055.386.888	98,97%	18.060.826.660	(5.439.772)	(0,03%)
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	78.575.598.000	76.112.852.005	96,87%	75.327.641.631	785.210.374	1,04%
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	6.477.049.000	6.433.423.230	99,33%	2.665.135.386	3.768.287.844	141,39%
Pengembalian Belanja Barang			(2.112.422.919)		(596.556.260)	(1.515.866.659)	254,10%
Jumlah Kelompok Belanja Barang		280.335.133.000	272.861.812.750	97,33%	295.345.903.008	(22.484.090.258)	(7,61%)

Kemenko Bidang Perekonomian mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp11.908.817.000,00. Anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 terserap sebesar Rp11.556.731.102,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp9.208.346.201,00. Rincian belanja barang penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja barang untuk Penanganan Pandemi Covid 19

Akun	Uraian Akun	Realisasi 31 Desember 2021			Realisasi 31 Desember 2020	Perbandingan Realisasi	
		Pagu	Realisasi	%		Naik (Turun)	%
521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	4.610.697.000	4.480.570.415	97,18%	1.745.336.109,00	2.735.234.306,00	156,72%
	Biaya Komunikasi, pengadaan masker/hand sanitizer, lisensi aplikasi video conference						
521241	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	3.762.000.000	3.706.259.266	98,52%	3.726.673.852,00	(20.414.586,00)	(0,55%)
	Swab tes antigen dan PCR						
521841	Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi Covid 19	1.171.850.000	1.131.513.800	96,56%	1.199.770.988,00	(68.257.188,00)	(5,69%)
	Pengadaan Masker dan Hand Sanitizer sebagai Persediaan						
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19	2.343.340.000	2.219.957.621	94,73%	2.536.565.252,00	(316.607.631,00)	(12,48%)
	Jasa Penanganan Covid-19 dan Honor Narasumber melalui video conference						
524115	Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid 19	20.930.000	18.430.000	88,06%	-	18.430.000,00	100,00%
	Biaya Karantina dalam rangka perjalanan dinas						
Jumlah Belanja		11.908.817.000	11.556.731.102	97,04%	9.208.346.201,00	2.348.384.901,00	25,50%

B.2.3. BELANJA MODAL

*Realisasi Belanja
Modal
Rp8.538.871.437*

Pada periode 31 Desember 2021, pagu Belanja Modal telah terealisasi sebesar 92,34% atau sebesar Rp8.538.871.437,00 dari pagu sebesar Rp9.247.045.000,00. Nominal pagu terbesar pada Belanja Modal terdapat pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.420.060.000,00, kemudian diikuti Belanja Modal Lainnya sebesar Rp826.985.000,00 yang digunakan untuk perolehan Aset Tak Berwujud dalam bentuk perangkat lunak komputer (*software*) dan lisensi dan belanja penambahan nilai Aset Tetap Lainnya. Capaian nominal terbesar realisasi Belanja Modal terdapat pada kelompok Belanja Peralatan Mesin, yang terealisasi sebesar Rp7.836.055.437,00 atau 93,06%. Sedangkan untuk belanja modal lainnya terealisasi sebesar Rp702.816.000,00 atau 84,99%.

Perbandingan realisasi belanja modal pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020, masing-masing sebesar Rp8.538.871.437,00 dan Rp13.696.176.615,00. Rincian belanja modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kelompok Belanja	Uraian	31-Dec-21 Pagu	Realisasi	%	Realisasi 31 Desember 2020	Perbandingan Realisasi	
						Naik (turun)	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.420.060.000	7.836.055.437	93,06%	11.713.396.215	(3.877.340.778)	(33,10%)
5361	Belanja Modal Lainnya	826.985.000	702.816.000	84,99%	1.982.780.400	(1.279.964.400)	(64,55%)
Pengembalian Belanja Modal		-	-				
Jumlah Belanja Modal		9.247.045.000	8.538.871.437	92,34%	13.696.176.615	(5.157.305.178)	(37,66%)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1.ASET LANCAR

*Aset Lancar
Rp710.395.785*

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp710.395.785,00 dan Rp748.721.003,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Aset Lancar	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	50.288.257	78.359.727
3	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	102.210.630	35.646.813
4	Piutang Bukan Pajak	88.570.238	558.674
5	Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	(442.851)	(2.793)
6	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	46.000.000
7	Penyiisihan Piutang Tak Tertagih- Bagian Lancar TP-TGR	-	(230.000)
8	Persediaan	469.769.511	588.388.582
Jumlah		710.395.785	748.721.003

C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 bersaldo sebesar Rp0, adapun saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) per 31 Desember 2021 yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

C.1.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp50.288.257*

Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 bersaldo Rp50.288.257,00 dan Rp78.359.727,00. Kas lainnya setara kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, antara lain penerimaan uang pengembalian belanja berupa pengembalian perjalanan dinas, honorarium tim, dan penerimaan uang potongan pajak yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

C.1.3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA

*Belanja Dibayar
Dimuka
Rp102.210.630*

Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp102.210.630,00 dan Rp35.646.813,00. Saldo per 31 Desember 2021 merupan manfaat yang sisa manfaatnya melampaui tanggal pelaporan. Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2021 merupakan belanja atas jasa fitur keamanan yang sisa manfaatnya masih dapat digunakan melebihi tanggal pelaporan.

C.1.4. PIUTANG BUKAN PAJAK

*Piutang Bukan
Pajak
Rp88.570.238*

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp88.570.238,00 dan Rp558.674,00 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 merupakan piutang atas honorarium PPNPN dan piutang atas kekurangan volume pekerjaan.

C.1.5. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Piutang
Bukan Pajak
(Rp442.851)*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp442.851) dan (Rp2.793,00). Nilai tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2020 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digolongkan dalam piutang dengan kualitas lancar. Dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek sesuai dengan yang diatur di PMK Nomor 69/PMK/06/2014 menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%.

C.1.6. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp46.000.000,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.7. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Bagian
Lancar Tagihan
TP/TGR Rp0*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan (Rp230.000,00). Nilai tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek sesuai dengan yang diatur di PMK Nomor 69/PMK/06/2014 menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%.

C.1.8. PERSEDIAAN

Persediaan

Rp469.769.511

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp469.769.511,00 dan Rp588.388.582,00. Persediaan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran dan peralatan dan mesin yang akan dihibahkan ke pemerintah daerah dan pihak swasta. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Persediaan

No	Uraian	31-Dec-21	31 Des 2020
1	Barang Konsumsi	224.657.448	345.222.870
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	48.981.400	69.889.694
3	Persediaan Lainnya	196.130.663	173.276.018
Jumlah		469.769.511	588.388.582

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 berdasarkan metode FIFO

C.2.ASET TETAP

Aset Tetap

Rp20.606.701.257

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp20.606.701.257,00 dan Rp21.875.723.741,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Aset Tetap

No	Uraian	31-Dec-21	31 Des 20
1	Peralatan dan Mesin	83.623.800.130	78.465.371.778
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.092.285.347	2.078.674.827
3	Aset Tetap Lainnya	547.639.287	842.598.787
Total Nilai Perolehan		86.263.724.764	81.386.645.392
Akumulasi Penyusutan		(65.657.023.507)	(59.510.921.651)
Jumlah		20.606.701.257	21.875.723.741

C.2.1. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan

Mesin

Rp83.623.800.130

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp83.623.800.130,00 dan Rp78.465.371.778,00. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin terdiri atas realisasi belanja dalam rangka perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember

2021 sebesar Rp7.836.055.437,00. Kemudian terdapat mutasi tambah peralatan mesin berupa reklas dari belanja barang atas pembelian belanja modal yang masuk ke dalam belanja barang sebesar Rp84.745.100,00, penggunaan kembali aset tidak digunakan berupa mesin antrian sebesar Rp116.765.000,00, koreksi nilai aset tetap non revaluasi atas adanya transaksi normalisasi sebesar Rp7.995.840,00, masukan jurnal koreksi audit BPK sebesar Rp279.051.714,00 dan transaksi normalisasi atas update aplikasi sebesar Rp2.116.924,00. Mutasi kurang peralatan dan mesin berupa beban aset ekstrakomptabel sebesar Rp56.793.350,00, Reklas ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp73.980.500,00, Reklas Aset Tidak Digunakan sebesar Rp3.032.377.813,00, reklas ke belanja barang sebesar Rp3.300.000,00 dan piutang atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.850.000,00. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp64.799.286.588,00 sehingga nilai buku peralatan dan mesin adalah sebesar Rp18.824.513.542,00. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin

Uraian Transaksi	Saldo	
Nilai Perolehan per 31 Desember 2020		78.465.371.778
Mutasi Tambah		
Realisasi Belanja	7.836.055.437	
Reklas ke Belanja Modal	84.745.100	
Penggunaan kembali aset tidak digunakan	116.765.000	
Beban Aset Ekstrakomptabel	(56.793.350)	
Reklas ke aset tetap lainnya	(73.980.500)	
Reklas ke Belanja Barang	(3.300.000)	
Koreksi nilai aset tetap non reval	7.995.840	
Piutang atas Kekurangan Volume Pekerjaan	(1.850.000)	
Masukan Jurnal Koreksi Audit BPK	279.051.714	
Transaksi Normalisasi atas Update Aplikasi	2.116.924	
Total Mutasi Tambah	8.190.806.165	
Mutasi Kurang		
Reklas Aset Tidak Digunakan	3.032.377.813	
Total Mutasi Kurang	3.032.377.813	
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		83.623.800.130
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2021		64.799.286.588
Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021		18.824.513.542

Transaksi penambahan dan pengurangan pada Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Tabel 20
Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin

No	Kode Barang	Jumlah Unit	Rupiah Aset
301	Alat Bantu	11	1.297.263.804
302	Alat Angkutan Darat	16	3.538.509.105
305	Alat Kantor & Rumah Tangga	435	4.170.275.935
306	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	28	174.627.062
308	Alat Laboratorium		
310	Alat Komputer	139	1.602.278.777
Total		629	10.782.954.683

Tabel 21
Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin

Kelompok BMN	Mutasi Peralatan dan Mesin	Kuantitas	Nilai
A. Saldo Transaksi Pembelian dan Transfer Masuk			
301	Alat Bantu	19	1.335.727.804
302	Alat Angkutan	15	3.538.444.000
303	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
305	Alat Kantor & Rumah Tangga	792	9.168.177.479
306	Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	39	500.137.026
307	Alat Kedokteran dan Kesehatan	10	454.315.000
308	Alat Laboratorium	3	16.995.000
309	Alat Khusus Kepolisian		-
310	Komputer	52	927.586.726
315	Alat Deteksi & SAR		
Total Saldo Pembelian dan Transfer Masuk		930	15.941.383.035
B. Transaksi Pengembangan Nilai Aset			
301	Alat Besar		-
310	Komputer		-
Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset			-
C. Transaksi Pengembangan Melalui KDP			
301	Alat Besar		-
310	Komputer		-
Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset			-
Mutasi Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2021		930	15.941.383.035

Terdapat transaksi normalisasi pada barang milik negara yang menimbulkan pergantian NUP baru. Atas adanya transaksi normalisasi tersebut menyebabkan mutasi tambah dan mutasi kurang peralatan mesin sebesar Rp7.750.576.870,00.

C.2.2. JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp2.092.285.347

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.092.285.347,00 dan Rp2.078.674.827,00. Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu atas hasil

transfer masuk dari Kementerian Keuangan berupa Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil. Penambahan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan hasil dari usulan jurnal koreksi audit BPK atas kapitalisasi peremajaan aset chiller.

C.2.3. ASET TETAP LAINNYA

*Aset Tetap
lainnya
Rp547.639.287*

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp547.639.287,00 dan Rp842.598.787,00. Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara fisik berupa data gambar satelit atas program hibah JUTPI Phase II, wayang, lukisan dan artwork. Penurunan saldo aset tetap lainnya dikarenakan terdapat transfer keluar berupa aset tetap renovasi ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan senilai Rp391.600.000,00 tanggal 16 September 2021.

C.2.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp65.657.023.507*

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp65.657.023.507,00 dan Rp59.510.921.651,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 22
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	83.623.800.130	64.799.286.588	18.824.513.542
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.092.285.347	857.736.919	1.234.548.428
3	Aset Tetap Lainnya	547.639.287		547.639.287
Jumlah		86.263.724.764	65.657.023.507	20.606.701.257

C.3.ASET LAINNYA

*Aset Lainnya
Rp2.952.709.950*

Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.952.709.950,00 dan Rp3.837.962.573,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Penurunan saldo aset lainnya di tahun 2021 dikarenakan adanya penghapusan aset tidak berwujud sesuai Keputusan Sesmenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 senilai Rp282.945.000,00,

penghapusan aset tetap tidak digunakan sesuai Keputusan Sesmenko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 senilai Rp1.906.108.325,00, penghapusan aset tetap atas hasil lelang sesuai Keputusan Sesmenko Perekonomian Nomor 22 Tahun 2021 tanggal 14 April 2021 senilai Rp2.533.095.990,00 dan Keputusan Sesmenko Perekonomian nomor 36 Tahun 2021 tanggal 01 Desember 2021 senilai Rp3.421.638.992,00.

C.3.1. ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud
Rp9.028.538.427

Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.028.538.427,00 dan Rp17.050.923.442,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa *software* dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Transaksi Aset tak Berwujud Tahun 2021

Jenis Transaksi Aset Tak Berwujud	Nilai
Saldo Awal	17.050.923.442
- <i>Software</i>	14.797.735.942
- Lisensi	2.253.187.500
Mutasi Tambah	
- Pembelian <i>Software</i> Komputer	702.816.000
- Hibah Masuk <i>Software</i>	
- Koreksi Antar Beban	
- Pembelian Lisensi	
- Pengembangan Nilai Aset <i>Software</i>	
- Pengembangan Melalui KDP <i>Software</i>	
Mutasi Kurang	
- Reklas ke Aset Tidak Digunakan	8.442.256.015
Penghapusan	
- <i>Software</i> Komputer	227.945.000
- Lisensi	55.000.000
Saldo ATB Per 31 Desember 2021	9.028.538.427
- <i>Software</i>	8.923.350.927
- Lisensi	105.187.500

C.3.2. ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain
Rp13.144.604.725

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.144.604.725,00 dan Rp9.646.100.004,00. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) terdiri atas aset tetap dan aset tak

berwujud yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas, atau dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Kenaikan saldo aset lain-lain di tahun 2021 dikarenakan adanya Reklas Aset tidak digunakan sebesar Rp3.032.377.813,00 dan reklas atas aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp8.442.256.015,00. Terdapat penurunan atas saldo aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah dikarenakan adanya penggunaan kembali atas aset tidak digunakan berupa mesin antrian senilai Rp116.765.000,00, penghapusan aset tetap tidak digunakan sesuai Keputusan Sesmenko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 senilai Rp1.906.108.325,00 dan penghapusan aset tetap atas hasil lelang sesuai Keputusan Sesmenko Perekonomian Nomor 22 Tahun 2021 tanggal 14 April 2021 senilai Rp2.533.095.990,00 dan Keputusan Sesmenko Perekonomian nomor 36 Tahun 2021 tanggal 01 Desember 2021 senilai Rp3.421.638.992,00. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, terdiri atas:

Tabel 24
Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	4.702.348.710	9.646.100.004
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	8.442.256.015	
Jumlah		13.144.604.725	9.646.100.004

Mutasi atas kenaikan saldo aset lain-lain tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Mutasi Aset Lain-Lain

Uraian	Nilai
Nilai perolehan per 31 Desember 2020	9.646.100.004
Mutasi Tambah	
Reklas Aset Tetap Tidak digunakan	3.032.377.813
Reklas Aset Tidak Berwujud yang Tidak Digunakan	8.442.256.015
Total Mutasi Tambah	11.474.633.828
Mutasi Kurang	
Penghapusan Aset (SK Nomor 9 TA 2021)	1.906.108.325
Penghapusan Aset (SK Nomor 22 TA 2021)	2.533.095.990
Penghapusan Aset (SK Nomor 36 TA 2021)	3.420.159.792
Penggunaan kembali atas aset tidak digunakan	116.765.000
Total Mutasi Kurang	7.976.129.107
Saldo Akhir 31 Desember 2021	13.144.604.725

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Lain-lain
Rp19.220.433.202*

C.3.3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar minus Rp19.220.433.202,00 dan Rp22.859.060.873,00.

Tabel 26
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	8.923.350.927	6.966.686.602	1.956.664.325
2	Lisensi	105.187.500	68.371.875	36.815.625
Jumlah A. Aset Tak Berwujud		9.028.538.427	7.035.058.477	1.993.479.950
B	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan			
1	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan			-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan		-		-
C	Aset Lainnya			
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	4.702.348.710	4.702.348.710	0
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	8.442.256.015	7.483.026.015	959.230.000
Jumlah B. Aset Lainnya		13.144.604.725	12.185.374.725	959.230.000
D	Aset Lainnya Yang Belum Diregister			
1	Aset Lainnya Yang Belum Diregister			-
Aset Lainnya Yang Belum Diregister				
Total		22.173.143.152	19.220.433.202	2.952.709.950

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp5.153.692.713*

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.153.692.713,00 dan Rp5.102.000.765,00 yang merupakan kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Mutasi saldo kewajiban jangka pendek diantaranya terdapat sisa UP/TUP dan utang belanja pegawai yang masih harus dibayar.

C.4.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

*Utang Kepada
Pihak ketiga
Rp5.149.007.713,00*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp5.149.007.713,00 dan Rp5.099.815.438,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 27
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Uraian Akun	Saldo	Keterangan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	4.917.276.663	Kekurangan atas Gaji dan Tukin TA 2021 yang dibayar di TA 2022
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	231.731.050	Tagihan berupa telepon, listrik TA 2021 yang dibayar di TA 2022
Total	5.149.007.713	-

C.4.2. UANG MUKA DARI KPPN

*Uang Muka Kppn
Rp0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka KPPN merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.4.3. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp4.685.000*

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 bersaldo Rp4.685.000,00, sedangkan per 31 Desember 2020 bersaldo Rp2.185.327,00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada tahun 2021 merupakan saldo kas yang berasal dari pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

C.5. EKUITAS

*Ekuitas
Rp19.116.114.279*

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.116.114.279,00 dan Rp21.360.406.552,00.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0.

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Rp0*

Tabel 28
Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik/Turun	Naik/Turun
				%
Pendapatan PNBPN Lainnya				
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan			-	-
- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	299.900	-	(100%)
- Pendapatan Anggaran Lain Lain		-		-
Jumlah	-	-	-	-

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp105.227.710.960,00 dan Rp97.588.418.163,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah Beban Pegawai mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020 dikarenakan adanya penerimaan pegawai baru pada tahun 2021.

*Beban Pegawai
Rp105.227.710.960*

Tabel 29
Rincian Beban Pegawai

Uraian Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	26.035.785.080	22.826.003.940	3.209.781.140	14,06%
Beban Pembulatan Gaji PNS	460.816	337.173	123.643	36,67%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.525.806.970	1.317.756.814	208.050.156	15,79%
Beban Tunj. Anak PNS	394.235.994	353.163.926	41.072.068	11,63%
Beban Tunj. Struktural PNS	4.955.010.000	4.617.075.000	337.935.000	7,32%
Beban Fungsional PNS	403.425.000	432.920.000	(29.495.000)	-6,81%
Beban Tunj. PPh PNS	268.805.980	200.541.963	68.264.017	34,04%
Beban Tunj. Beras PNS	1.328.931.240	997.440.660	331.490.580	33,23%
Beban Uang Makan PNS	4.714.374.050	4.430.429.950	283.944.100	6,41%
Beban Tunjangan Umum PNS	840.600.000	687.285.000	153.315.000	22,31%
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	262.500.000	227.500.000	35.000.000	15,38%
Beban Uang Lembur	93.177.000	113.520.000	(20.343.000)	-17,92%
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	64.454.574.567	61.436.963.143	3.017.611.424	4,91%
Pengembalian Beban Pegawai	(49.975.737)	(52.519.406)	2.543.669	-4,84%
Jumlah	105.227.710.960	97.588.418.163	7.639.292.797	7,83%

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan
Rp4.732.239.494

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.732.239.494,00 dan Rp5.274.974.005,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Beban Persediaan

Uraian Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik / (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	3.495.995.782	4.096.242.387	(600.246.605)	(14,65%)
Beban Persediaan Lainnya	1.236.243.712	1.178.731.618	57.512.094	4,88%
Beban Persediaan Bahan Baku				
Jumlah Beban Persediaan	4.732.239.494	5.274.974.005	(542.734.511)	(10,29%)

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa
Rp323.965.848.155

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp323.965.848.155,00 dan Rp335.984.893.432,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	7.560.359.985	5.680.350.029	1.880.009.956	33,10%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	10.454.400	(10.454.400)	(100,00%)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21.892.000	29.633.800	(7.741.800)	(26,12%)
Beban Honor Operasional Satker	1.411.440.500	1.486.270.000	(74.829.500)	(5,03%)
Beban Barang Operasional lainnya	2.587.683.606	2.176.112.732	411.570.874	18,91%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid	4.516.217.228	1.709.689.296	2.806.527.932	164,15%
Beban Bahan	6.428.591.264	11.664.505.090	(5.235.913.826)	(44,89%)
Beban Honor Output Kegiatan	6.014.937.500	7.914.011.500	(1.899.074.000)	(24,00%)
Beban Barang Non Operasional	1.242.237.011	637.946.000	604.291.011	94,72%
Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi	3.706.259.266	3.726.673.852	(20.414.586)	(0,55%)
Beban Langganan Listrik	2.374.528.114	726.458.260	1.648.069.854	226,86%
Beban Langganan Telepon	86.490.872	91.495.888	(5.005.016)	(5,47%)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.953.603.602	5.670.040.079	1.283.563.523	22,64%
Beban jasa Pos dan Giro	1.705.500	-	1.705.500	100,00%
Beban Jasa Konsultan	8.588.701.250	15.199.496.659	(6.610.795.409)	(43,49%)
Beban Sewa	58.565.029.614	51.689.585.213	6.875.444.401	13,30%
Beban Jasa Profesi	5.098.000.000	5.242.217.072	(144.217.072)	(2,75%)
Beban Jasa Lainnya	208.357.961.640	219.745.892.810	(11.387.931.170)	(5,18%)
Beban Aset Ekstrakomtabel	56.793.350	14.513.000	42.280.350	291,33%
Beban Jasa- Penanganan Pandemi Covid 19	2.221.557.621	2.586.065.252	(364.507.631)	(14,10%)
Pengembalian Beban Barang & Jasa	(1.828.141.768)	(16.517.500)	(1.811.624.268)	10967,91%
Jumlah Beban Barang dan Jasa	323.965.848.155	335.984.893.432	(12.019.045.277)	(3,58%)

Beban barang dan jasa khusus penanganan pandemi Covid-19 sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp10.444.034.115,00 yang terdiri dari Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 senilai Rp4.516.217.228,00, Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp3.706.259.266,00 dan Beban Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19 senilai

Rp2.221.557.621,00. Rincian beban barang dan jasa khusus penanganan pandemi Covid-19 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Barang Jasa Penanganan Pandemi

No	Beban	Jumlah	Keterangan
1	Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	4.516.217.228	
	Biaya Komunikasi, pengadaan masker/hand sanitizer, lisensi aplikasi video conference		
2	Beban barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	3.706.259.266	
	Swab tes antigen dan PCR		
3	Beban Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19	2.221.557.621	
	Jasa Penanganan Covid 19 dan honor narasumber melalui video conference		
Jumlah		10.444.034.115	

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

*Beban
Pemeliharaan
Rp17.115.089.880*

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17.115.089.880,00 dan Rp17.887.163.923,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.191.346.802	14.986.743.963	(1.795.397.161)	(11,98%)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.517.316.844	2.556.263.197	961.053.647	37,60%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	406.426.234	344.156.763	62.269.471	18,09%
Jumlah	17.115.089.880	17.887.163.923	(772.074.043)	(4,32%)

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp82.238.673.327*

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp82.238.673.327,00 dan Rp77.380.028.857,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	19.932.669.858	11.166.155.567	8.766.514.291	78,51%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	265.575.000	372.855.000	(107.280.000)	(28,77%)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.177.026.478	22.179.406.086	(3.002.379.608)	(13,54%)
Belanja Perjalanan Dinas- Penanganan Pandemi Covid-19	18.430.000	-	18.430.000	100,00%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36.695.829.912	41.576.515.578	(4.880.685.666)	(11,74%)
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	1.856.635.243	981.237.509	875.397.734	89,21%
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	4.576.787.987	1.683.897.877	2.892.890.110	171,80%
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas	(284.281.151)	(580.038.760)	295.757.609	(50,99%)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	82.238.673.327	77.380.028.857	4.858.644.470	6,28%

Beban Perjalanan Dinas khusus penanganan pandemi Covid-19 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp18.430.000,00. Beban tersebut merupakan biaya atas karantina dalam rangka perjalanan dinas luar negeri.

D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

*Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat
Rp1.312.758.326*

Jumlah beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.312.758.326,00 dan Rp0. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada tahun 2021 merupakan beban atas penyerahan alat penunjang pendidikan berupa peralatan mesin yang berasal dari Hibah TVET System Reform dan disalurkan kepada 11 entitas penerima.

D.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp10.252.582.040*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp10.252.582.040,00 dan Rp10.774.670.047,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.841.315.117	7.703.845.942	1.137.469.175	14,76%
Beban Penyusutan Jaringan	52.250.423	29.306.674	22.943.749	78,29%
Beban Amortisasi Software	1.130.562.750	2.767.952.382	(1.637.389.632)	(59,16%)
Beban Amortisasi Lisensi	115.168.750	225.318.750	(110.150.000)	(48,89%)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan	113.285.000	-	113.285.000	(100,00%)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	48.246.299	(48.246.299)	100,00%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	10.252.582.040	10.774.670.047	(522.088.007)	(4,85%)

D.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp210.058*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidakterttagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp210.058,00 dan minus Rp460.419,00. Saldo atas Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terjadi atas penyesuaian atas saldo pada akun penyisihan piutang tak tertagih periode berjalan dengan periode sebelumnya. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Uraian Jenis Belanja	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang- TP/TGR	(230.000)	-	(230.000)	100,00%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	440.058	(460.419)	900.477	(195,58%)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	210.058	(460.419)	670.477	(145,62%)

D.10. KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Kegiatan Non
Operasional
Rp815.481.562*

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2021 sebesar Rp815.481.562,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Uraian Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun)	%
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional				
- Surplus (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	806.569.611	114.751.527	691.818.084	602,88%
# Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.030.819.404	130.101.089	900.718.315	692,32%
# Beban Pelepasan Aset Non Lancar	224.249.793	15.349.562	208.900.231	1360,95%
- Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8.911.951	84.017.640	(75.105.689)	(89,39%)
# Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8.911.951	187.351.423	(178.439.472)	(95,24%)
a. Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL	190.051	4.452.990	(4.262.939)	(95,73%)
b. Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL	8.721.900	14.478.800	(5.756.900)	(39,76%)
c. Penerimaan Kembali Modal TAYL	-	-	-	
d. Pendapat Penyesuaian Nilai Persediaan	-	160.694.633	(160.694.633)	(100,00%)
e. Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi		7.725.000	(7.725.000)	
f. Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR	-		-	-
# Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	103.333.783	(103.333.783)	(100,00%)
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	815.481.562	198.769.167	616.712.395	310,27%

Surplus dari pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari Pendapatan Pemindahtanganan BMN lainnya berupa hasil lelang atas barang milik negara yang telah dihentikan dari operasional pemerintahan sebesar Rp1.030.819.404,00. Sedangkan untuk Beban Pelepasan Aset non Lancar merupakan kerugian atas hasil penghapusan BMN sebesar Rp224.249.793,00. Adapun surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya diperoleh dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu atas Belanja Pegawai sebesar Rp190.051,00 dan Belanja Barang sebesar Rp8.721.900,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp21.360.406.552

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp21.360.406.552,00 dan Rp44.904.967.550,00.

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Surplus (Defisit) LO
Rp(544.029.630.678)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar Rp(544.029.630.678,00) dan (Rp544.690.618.941,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi Rp0

Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi pada 31 Desember 2021 dan tahun 2020.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH EKUITAS

Koreksi *yang*
Menambah *Ekuitas*
(Rp66.669.695)

Saldo Koreksi yang menambah ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah bersaldo minus Rp66.669.695,00. Adapun pada 31 Desember 2020 bersaldo Rp0. Saldo Koreksi yang menambah ekuitas tahun 2021 merupakan saldo atas transaksi normalisasi barang milik negara dan piutang atas kekurangan volume pekerjaan.

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar
Entitas
Rp541.852.008.100

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp541.852.008.100,00 dan Rp521.146.057.943,00. Transfer Keluar merupakan transfer aset berupa Aset Tetap Renovasi senilai Rp1.394.135.908,00 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan transfer aset berupa peralatan mesin ke 5 entitas penerima sebesar Rp144.180.765,00. Terdapat pengesahan hibah langsung sebesar Rp157.759.742.299,00. Rincian Transaksi antar Entitas s.d. 31 Desember 2021 terdiri dari:

Tabel 38
Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Jenis Beban	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.162.464.429)
Ditagihkan ke Entitas Lain	386.793.046.903
Transfer Keluar	(1.538.316.673)
Pengesahan Hibah Langsung	157.759.742.299
Jumlah	541.852.008.100

E.6. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir
Rp19.116.114.279

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.116.114.279,00 dan Rp21.360.406.552,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan dua rekening untuk menampung uang keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN, yaitu:

- Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) mengelola rekening Induk pada Bank Mandiri Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 1030007727577, yang bersaldo sebesar Rp0 per tanggal 31 Desember 2021.
- Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755) mengelola rekening Induk pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 651164277551000 yang bersaldo sebesar Rp0 per tanggal 31 Desember 2021.

F.2. REALISASI PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I.

Pagu Anggaran PN I adalah Rp16.778.000.000,00 dan total realisasi sebesar Rp16.691.223.357,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN I antara lain sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran Target Volume Keluaran	Target Volume Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Persentase Realisasi Volume Keluaran
Program Koordinasi Pelaksanaan kebijakan	2519. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri	PBK.001. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	784.929.000	784.393.149	99,93%	1,00	1,00	100%
		PBK.002. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor	543.831.000	542.565.145	99,77%	1,00	1,00	100%
		PBK.003. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	449.240.000	447.019.028	99,51%	1,00	1,00	100%
	2521. Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan	PBB.001. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	500.000.000	499.551.052	99,91%	1,00	1,00	100%
		PBB.002. Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional	500.000.000	499.831.266	99,97%	1,00	1,00	100%
	4545. Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	PBK.001. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	1.000.000.000	995.462.880	99,55%	1,00	1,00	100%
	4550. Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	PBK.001. Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta kerja	13.000.000.000	12.922.400.837	99,40%	1,00	1,00	100%
Total			16.778.000.000	16.691.223.357	99,48%			

F.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.3.1. LELANG BARANG MILIK NEGARA

Terhadap barang inventaris yang tidak dapat digunakan kembali, telah disampaikan usulan permohonan lelang BMN barang inventaris kepada Kepala KPKNL Jakarta I. Pendapatan atas lelang tersebut kemudian dituangkan dalam salinan risalah lelang Nomor 106/25/2021 tanggal 9 Maret 2021, dengan nilai lelang barang terjual sebesar Rp939.819.405,00 dan penjualan 1 paket peralatan mesin sesuai risalah lelang nomor 454/25/2021 tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp90.999.999,00.

F.3.2. TRANSFER KELUAR

Terdapat transfer keluar berupa Aset Tetap Renovasi yang telah dilakukan serah terima oleh Kemenko Perekonomian diantaranya kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada tanggal 16 September 2021 senilai Rp391.600.000,00 dan tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp1.002.535.908,00. Kemenko Perekonomian juga melakukan transfer keluar berupa peralatan mesin ke 5 entitas penerima diantaranya Politeknik Negeri Media Kreatif sebesar Rp15.842.631,00, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebesar Rp80.810.242,00, Politeknik Negeri Batam sebesar Rp 15.842.630,00, Balai besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya sebesar Rp15.842.631,00, dan Politeknik Elektronik Negeri Surabaya sebesar Rp15.842.631,00.

F.3.3. REVISI DIPA PAGU ANGGARAN

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat revisi yang dilakukan atas DIPA Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA.035) yaitu pada:

- Satuan Kerja 427752 (Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) melaksanakan Revisi DIPA Nomor DIPA-035.01.1.427752/2021 sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan tanggal revisi terakhir 29 Desember 2021 dengan besaran pagu sebesar Rp379.920.613.000,00.
- Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah melakukan 5 (lima) kali revisi DIPA, dengan tanggal revisi terakhir tanggal 28 Desember 2021 dan besaran pagu sebesar Rp15.775.711.000,00.

F.3.4. INFORMASI HIBAH LUAR NEGERI

Pada tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima hibah langsung antara lain:

a. HIBAH PROSPERA

Hibah tersebut berdasarkan pada perjanjian hibah yang tertuang dalam Subsidiary Arrangement (SA) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia tanggal 4 Desember 2017, dengan masa perjanjian oleh kedua belah pihak untuk periode 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2023. Hibah dari pemerintah Australia tersebut teregister di Kementerian Keuangan dengan nomor 23TSV7CA dengan total alokasi nilai hibah sebesar AUD 145.000.000 (Pagu Indikatif) yang dilaksanakan oleh 26 (dua puluh enam) Kementerian/Lembaga. Kegiatan hibah yang dibiayai dari pemerintah Australia dilaksanakan melalui proyek Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA).

Pagu indikatif PROSPERA yang dibiayai dari hibah pemerintah Australia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebesar AUD 53.594.600. Realisasi kegiatan hibah untuk tahun 2019 sebesar Rp76.836.389.526,00, untuk kegiatan Tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp141.911.292.772,00, dan untuk kegiatan Tahun 2021 telah dilakukan serah terima hibah dengan nomor BA-7/SET.M.EKON.4/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp128.058.431.254,00..

b. HIBAH TVET SYSTEM REFORM

Hibah TVET System Reform dituangkan pada perjanjian hibah yang tertuang dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman tanggal 15 Mei 2019 dengan periode sampai dengan 31 Mei 2022. Kegiatan hibah tersebut dibiayai oleh Pemerintah Jerman melalui Proyek Kerja Sama Teknis Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Kerujuran. Hibah tersebut telah dilakukan registrasi ke Kementerian Keuangan dengan nomor 2BPKDM1A dengan total nilai alokasi hibah sebesar EUR 3.000.000. Realisasi kegiatan hibah untuk tahun 2021 sebesar Rp29.066.781.633,00 dan telah dilakukan serah terima dengan nomor BAST-2/SET.M.EKON.4/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021.

c. Hibah KIAT

Hibah Fasilitas Kemitraan Indonesia dan Australia untuk Infrastruktur (KIAT) telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan nomor 2FR4C6KA dengan pagu sebesar AUD 150.000.000. Dalam hibah tersebut, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional / Bappenas menjadi *Executing Agency* dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi salah satu dari *Implementing Agency*. Sebagai *Implementing Agency*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan serah terima hibah sesuai dengan berita acara serah terima nomor BA-5/SET.M.EKON.4/11/2021 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp634.529.412,00.

LAMPIRAN PENDUKUNG

**Lampiran III. Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2021**

No.	Kode Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank / Kantor Pos	Kode	Surat Ijin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Ket
						Nomor	Tanggal			
1	427752	103-00-0772757-7	RKK KEMENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	20	S-1044/WPB.12/KP.02/2020	02-06-2020	31-12-2021	Rp -	-
2	427752	8100-1242-7752-1000	BPG 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	20	S-258/SES.M.EKON/05/2020	27-05-2020	31-12-2021	Rp -	-
3	427752	8100-1242-7752-1001	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2021	Rp -	-
4	427752	8100-1242-7752-1002	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2021	Rp -	-
5	427752	8100-1242-7752-1003	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2021	Rp -	-

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

6	427752	8100-1242-7752-1004	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2021	Rp	-	-
7	427752	8100-1242-7752-1005	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2021	Rp	-	-
8	427752	8100-1242-7752-1006	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2021	Rp	-	-
9	427752	8100-1242-7752-1007	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2021	Rp	-	-
10	427752	8100-1242-7752-1008	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2021	Rp	-	-
11	427752	8100-1242-7752-1009	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2021	Rp	-	-
12	427752	8100-1242-7752-1010	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2021	Rp	-	-

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

13	427752	8100-1242-7752-1011	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2021	Rp	-	-
14	427752	8100-1242-7752-1012	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2021	Rp	-	-
15	427752	8100-1242-7752-1013	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2021	Rp	-	-
16	427755	0329-01-004393-30-0	RKK KEMENKO PEREKONOMIAN	Bank Rakyat Indonesia KCP Departemen Keuangan	20	S-1045/WPB.12/KP.02/2020	02-06-2020	17-12-2021	Rp	-	-
17	427755	6511-6427-7551-000	BPG 019 BA 69 PEREKONOMIAN	Bank Rakyat Indonesia KCP Departemen Keuangan	20	S-260/SES.M.EKON/05/2020	29-05-2020	17-12-2021	Rp	-	-

Lampiran IV Laporan Pendukung

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 24/04/22 11:08 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	1,162,464,429	1,162,464,429	0	0	264,677,956	264,677,956	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	1,162,464,429	1,162,464,429	0	0	264,677,956	264,677,956	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	106,114,146,000	105,392,362,716	(721,783,284)	99	98,009,048,000	97,072,256,965	(936,791,035)	99
	BELANJA BARANG	280,335,133,000	272,861,812,750	(7,473,320,250)	97	309,169,926,000	295,345,903,008	(13,824,022,992)	96
	BELANJA MODAL	9,247,045,000	8,538,871,437	(708,173,563)	92	13,916,574,000	13,696,176,615	(220,397,385)	98
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	395,696,324,000	386,793,046,903	(8,903,277,097)	98	421,095,548,000	406,114,336,588	(14,981,211,412)	96
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 24/04/22 11:08
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	299,900	(299,900)	(100)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	299,900	(299,900)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	299,900	(299,900)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	105,227,710,960	97,588,418,163	7,639,292,797	7.828
Beban Persediaan	4,732,239,494	5,274,974,005	(542,734,511)	(10.289)
Beban Barang dan Jasa	323,965,848,155	335,984,893,432	(12,019,045,277)	(3.577)
Beban Pemeliharaan	17,115,089,880	17,887,163,923	(772,074,043)	(4.316)
Beban Perjalanan Dinas	82,238,673,327	77,380,028,857	4,858,644,470	6.279
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1,312,758,326	0	1,312,758,326	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 24/04/22 11:08
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	10,252,582,040	10,774,670,047	(522,088,007)	(4.846)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	210,058	(460,419)	670,477	(145.623)
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	544,845,112,240	544,889,688,008	(44,575,768)	(0.008)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(544,845,112,240)	(544,889,388,108)	44,275,868	(0.008)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	806,569,611	114,751,527	691,818,084	602.884
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,030,819,404	130,101,089	900,718,315	692.322
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	224,249,793	15,349,562	208,900,231	1,360.952
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,911,951	84,017,640	(75,105,689)	(89.393)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,911,951	187,351,423	(178,439,472)	(95.243)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	103,333,783	(103,333,783)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	815,481,562	198,769,167	616,712,395	310.266
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(544,029,630,678)	(544,690,618,941)	660,988,263	(0.121)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(544,029,630,678)	(544,690,618,941)	660,988,263	(0.121)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 24/04/22 11:08

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	21,360,406,552	44,904,967,550	(23,544,560,998)	(52.432)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(544,029,630,678)	(544,690,618,941)	660,988,263	(0.121)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(66,669,695)	0	(66,669,695)	()
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(142,268,695)	0	(142,268,695)	()
LAIN-LAIN	75,599,000	0	75,599,000	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	541,852,008,100	521,146,057,943	20,705,950,157	3.973
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,244,292,273)	(23,544,560,998)	21,300,268,725	(90.468)
EKUITAS AKHIR	19,116,114,279	21,360,406,552	(2,244,292,273)	(10.507)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 24/04/2022 11:08 PM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	50,288,257	78,359,727	(28,071,470)	(35.82)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	102,210,630	35,646,813	66,563,817	186.73
Piutang Bukan Pajak	88,570,238	558,674	88,011,564	15,753.65
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(442,851)	(2,793)	(440,058)	15,755.75
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	88,127,387	555,881	87,571,506	15,753.64
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	46,000,000	(46,000,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	(230,000)	230,000	(100.00)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	0	45,770,000	(45,770,000)	(100.00)
Persediaan	469,769,511	588,388,582	(118,619,071)	(20.16)
JUMLAH ASET LANCAR	710,395,785	748,721,003	(38,325,218)	(5.12)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	83,623,800,130	78,465,371,778	5,158,428,352	6.57
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,092,285,347	2,078,674,827	13,610,520	0.65
Aset Tetap Lainnya	547,639,287	842,598,787	(294,959,500)	(35.01)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(65,657,023,507)	(59,510,921,651)	(6,146,101,856)	10.33
JUMLAH ASET TETAP	20,606,701,257	21,875,723,741	(1,269,022,484)	(5.80)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	9,028,538,427	17,050,923,442	(8,022,385,015)	(47.05)
Aset Lain-lain	13,144,604,725	9,646,100,004	3,498,504,721	36.27
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(19,220,433,202)	(22,859,060,873)	3,638,627,671	(15.92)
JUMLAH ASET LAINNYA	2,952,709,950	3,837,962,573	(885,252,623)	(23.07)
JUMLAH ASET	24,269,806,992	26,462,407,317	(2,192,600,325)	(8.29)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	5,149,007,713	5,099,815,438	49,192,275	0.96
Utang Jangka Pendek Lainnya	4,685,000	2,185,327	2,499,673	114.38
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5,153,692,713	5,102,000,765	51,691,948	1.01
JUMLAH KEWAJIBAN	5,153,692,713	5,102,000,765	51,691,948	1.01
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	19,116,114,279	21,360,406,552	(2,244,292,273)	(10.51)
JUMLAH EKUITAS	19,116,114,279	21,360,406,552	(2,244,292,273)	(10.51)
JUMLAH EKUITAS	19,116,114,279	21,360,406,552	(2,244,292,273)	(10.51)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	24,269,806,992	26,462,407,317	(2,192,600,325)	(8.29)

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 24/04/2022 11:08 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	50,288,257	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	102,210,630	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	88,570,238	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	442,851
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	224,657,448	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	48,981,400	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	196,130,663	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	83,623,800,130	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	0	0
0.0	134113	Jaringan	2,092,285,347	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	0	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	547,639,287	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	64,799,286,588
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	857,736,919
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti	0	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan	0	0
0.0	162151	Software	8,923,350,927	0
0.0	162161	Lisensi	105,187,500	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	4,702,348,710	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	8,442,256,015	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	4,702,348,710
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	6,966,686,602
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	68,371,875
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	7,483,026,015
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	4,917,276,663
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	231,731,050
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	4,685,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	386,793,046,903
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,162,464,429	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 24/04/2022 11:08 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313211	Transfer Keluar	1,538,316,673	0
0.0	391111	Ekuitas	0	21,360,406,552
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	164,473,045	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	22,204,350
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	75,599,000
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	157,759,742,299
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,030,819,404
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	190,051
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	8,721,900
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	26,035,785,080	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	1,200,000
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	460,816	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	9,403
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,525,806,970	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	394,235,994	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	4,955,010,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	13,444,200
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	403,425,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	210,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	268,805,980	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,328,931,240	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	4,714,374,050	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	1,757,500
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	840,600,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	7,521,750
3.0	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	262,500,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	93,177,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	64,454,574,567	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	25,832,884
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	7,560,359,985	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21,892,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,411,440,500	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,587,683,606	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	4,516,217,228	0
3.0	521211	Beban Bahan	6,428,591,264	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	30,107,700
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	6,014,937,500	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	96,472,500
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,242,237,011	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	3,706,259,266	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,374,528,114	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	86,490,872	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 24/04/2022 11:08 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6,953,603,602	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	1,705,500	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	8,588,701,250	0
3.0	522141	Beban Sewa	58,565,029,614	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	5,098,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	208,357,961,640	0
3.1	522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0	1,699,961,568
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,221,557,621	0
3.1	522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,600,000
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13,191,346,802	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,517,316,844	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	19,932,669,858	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	34,967,555
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	265,575,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19,177,026,478	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	1,180,000
3.0	524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	18,430,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36,695,829,912	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	121,616,763
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,856,635,243	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	4,576,787,987	0
3.1	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	126,516,833
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8,841,315,117	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	52,250,423	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	1,130,562,750	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	115,168,750	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	113,285,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	0	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,495,995,782	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	406,426,234	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	1,312,758,326	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	1,236,243,712	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	440,058	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	0	230,000
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	56,793,350	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	224,249,793	0
JUMLAH			659,244,951,388	659,244,951,388

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 24/04/2022 11:07 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	8,903,277,097	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	1,162,464,429	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	26,193,044,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	773,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,534,403,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	401,051,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	5,012,050,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	413,065,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	294,894,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,342,226,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	4,956,092,000
2.0	511147	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	0
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	866,595,000
2.0	511152	Allotment Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	266,875,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	134,285,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	64,698,793,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	7,704,623,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	29,479,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	1,429,850,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	2,602,476,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan	0	4,610,697,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	6,972,731,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	6,055,369,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	1,291,228,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	0	3,762,000,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	3,866,713,000
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	192,000,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan	0	1,171,850,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	2,166,536,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	101,900,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	7,075,593,000
2.0	522121	Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro	0	1,773,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	8,716,242,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	58,807,010,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	5,744,870,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	52,393,609,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,343,340,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	14,332,062,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,910,535,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	20,404,151,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	275,550,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 24/04/2022 11:07 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	19,641,309,000
2.0	524115	Allotment Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	0	20,930,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	38,233,658,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	1,871,933,000
2.0	524219	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	4,605,116,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	8,420,060,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	826,985,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,030,819,404
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	46,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	190,051
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	85,454,974
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	26,149,775,780	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	1,200,000
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	460,816	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	9,403
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,525,806,970	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	394,235,994	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,956,090,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	13,444,200
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	403,425,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	210,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	268,805,980	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,328,931,240	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	4,745,763,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	1,757,500
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	840,600,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	7,521,750
3.0	511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	262,500,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	93,177,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	64,472,766,673	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	25,832,884
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	7,592,473,823	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21,892,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,411,440,500	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,587,683,606	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	4,480,570,415	0
3.0	521211	Belanja Bahan	6,428,591,264	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	30,107,700
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,037,220,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	96,472,500
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,242,237,011	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	3,706,259,266	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 24/04/2022 11:07 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,755,463,300	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	133,069,557	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	1,131,513,800	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,156,681,150	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	86,407,640	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	7,059,260,219	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	1,705,500	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	8,588,701,250	0
3.0	522141	Belanja Sewa	58,565,669,792	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	5,098,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	52,066,175,832	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	1,699,961,568
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,221,557,621	0
3.1	522192	Pengembalian Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-	0	1,600,000
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14,256,245,560	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,799,141,328	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	19,932,929,858	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	34,967,555
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	265,575,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19,177,026,478	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	1,180,000
3.0	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	18,430,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36,718,890,669	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	121,616,763
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,856,635,243	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	4,576,787,987	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	126,516,833
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,836,055,437	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	702,816,000	0
JUMLAH			399,021,187,085	399,021,187,085

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 24/04/22 11:08
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	25,363,569,000	26,193,044,000	26,149,775,780	1,200,000	26,148,575,780	99.83	44,468,220
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	688,000	773,000	460,816	9,403	451,413	59.61	321,587
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,533,034,000	1,534,403,000	1,525,806,970	0	1,525,806,970	99.44	8,596,030
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	377,612,000	401,051,000	394,235,994	0	394,235,994	98.3	6,815,006
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	5,287,450,000	5,012,050,000	4,956,090,000	13,444,200	4,942,645,800	98.88	69,404,200
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	503,020,000	413,065,000	403,425,000	210,000	403,215,000	97.67	9,850,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	185,929,000	294,894,000	268,805,980	0	268,805,980	91.15	26,088,020
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,340,147,000	1,342,226,000	1,328,931,240	0	1,328,931,240	99.01	13,294,760
511129	Belanja Uang Makan PNS	5,843,900,000	4,956,092,000	4,745,763,000	1,757,500	4,744,005,500	95.76	212,086,500
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan	50,000,000	0	0	0	0		0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	850,094,000	866,595,000	840,600,000	7,521,750	833,078,250	97	33,516,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	41,335,443,000	41,014,193,000	40,613,894,780	24,142,853	40,589,751,927	99.02	424,441,073
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	210,000,000	266,875,000	262,500,000	0	262,500,000	98.36	4,375,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	210,000,000	266,875,000	262,500,000	0	262,500,000	98.36	4,375,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	179,925,000	134,285,000	93,177,000	0	93,177,000	69.39	41,108,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	179,925,000	134,285,000	93,177,000	0	93,177,000	69.39	41,108,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	76,741,899,000	64,698,793,000	64,472,766,673	25,832,884	64,446,933,789	99.65	251,859,211
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	76,741,899,000	64,698,793,000	64,472,766,673	25,832,884	64,446,933,789	99.65	251,859,211
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	118,467,267,000	106,114,146,000	105,442,338,453	49,975,737	105,392,362,716	99.37	721,783,284
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	7,459,888,000	7,704,623,000	7,592,473,823	0	7,592,473,823	98.54	112,149,177
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	120,000,000	0	0	0	0		0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	86,500,000	29,479,000	21,892,000	0	21,892,000	74.26	7,587,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,425,980,000	1,429,850,000	1,411,440,500	0	1,411,440,500	98.71	18,409,500
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,905,000,000	2,602,476,000	2,587,683,606	0	2,587,683,606	99.43	14,792,394
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,922,593,000	4,610,697,000	4,480,570,415	0	4,480,570,415	97.18	130,126,585
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	13,919,961,000	16,377,125,000	16,094,060,344	0	16,094,060,344	98.27	283,064,656
5212	Belanja Barang Non Operasional							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 24/04/22 11:08
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	16,047,804,000	6,972,731,000	6,428,591,264	30,107,700	6,398,483,564	92.2	574,247,436
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	10,118,644,000	6,055,369,000	6,037,220,000	96,472,500	5,940,747,500	99.7	114,621,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,157,636,000	1,291,228,000	1,242,237,011	0	1,242,237,011	96.21	48,990,989
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	1,187,500,000	3,762,000,000	3,706,259,266	0	3,706,259,266	98.52	55,740,734
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	29,511,584,000	18,081,328,000	17,414,307,541	126,580,200	17,287,727,341	96.31	793,600,659
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,087,771,000	3,866,713,000	3,755,463,300	0	3,755,463,300	97.12	111,249,700
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	240,000,000	192,000,000	133,069,557	0	133,069,557	69.31	58,930,443
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	90,000,000	1,171,850,000	1,131,513,800	0	1,131,513,800	96.56	40,336,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	5,417,771,000	5,230,563,000	5,020,046,657	0	5,020,046,657	95.98	210,516,343
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,260,000,000	2,166,536,000	2,156,681,150	0	2,156,681,150	99.55	9,854,850
522112	Belanja Langganan Telepon	309,360,000	101,900,000	86,407,640	0	86,407,640	84.8	15,492,360
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8,517,061,000	7,075,593,000	7,059,260,219	0	7,059,260,219	99.77	16,332,781
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	1,000,000	1,773,000	1,705,500	0	1,705,500	96.19	67,500
522131	Belanja Jasa Konsultan	38,301,840,000	8,716,242,000	8,588,701,250	0	8,588,701,250	98.54	127,540,750
522141	Belanja Sewa	54,992,807,000	58,807,010,000	58,565,669,792	0	58,565,669,792	99.59	241,340,208
522151	Belanja Jasa Profesi	7,798,950,000	5,744,870,000	5,098,000,000	0	5,098,000,000	88.74	646,870,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	52,731,533,000	52,393,609,000	52,066,175,832	1,699,961,568	50,366,214,264	99.38	2,027,394,736
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,982,734,000	2,343,340,000	2,221,557,621	1,600,000	2,219,957,621	94.8	123,382,379
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	165,895,285,000	137,350,873,000	135,844,159,004	1,701,561,568	134,142,597,436	98.9	3,208,275,564
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,300,000,000	14,332,062,000	14,256,245,560	0	14,256,245,560	99.47	75,816,440
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,476,690,000	3,910,535,000	3,799,141,328	0	3,799,141,328	97.15	111,393,672
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	4,776,690,000	18,242,597,000	18,055,386,888	0	18,055,386,888	98.97	187,210,112
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	21,354,610,000	20,404,151,000	19,932,929,858	34,967,555	19,897,962,303	97.69	506,188,697
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,011,480,000	275,550,000	265,575,000	0	265,575,000	96.38	9,975,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,066,097,000	19,641,309,000	19,177,026,478	1,180,000	19,175,846,478	97.64	465,462,522
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	20,930,000	18,430,000	0	18,430,000	88.06	2,500,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31,032,093,000	38,233,658,000	36,718,890,669	121,616,763	36,597,273,906	96.04	1,636,384,094
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	83,464,280,000	78,575,598,000	76,112,852,005	157,764,318	75,955,087,687	96.87	2,620,510,313
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	250,000,000	1,871,933,000	1,856,635,243	0	1,856,635,243	99.18	15,297,757
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	15,904,540,000	4,605,116,000	4,576,787,987	126,516,833	4,450,271,154	99.38	154,844,846

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 24/04/22 11:08
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	16,154,540,000	6,477,049,000	6,433,423,230	126,516,833	6,306,906,397	99.33	170,142,603
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	319,140,111,000	280,335,133,000	274,974,235,669	2,112,422,919	272,861,812,750	98.09	7,473,320,250
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,062,060,000	8,420,060,000	7,836,055,437	0	7,836,055,437	93.06	584,004,563
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	5,062,060,000	8,420,060,000	7,836,055,437	0	7,836,055,437	93.06	584,004,563
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	665,000,000	826,985,000	702,816,000	0	702,816,000	84.99	124,169,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	665,000,000	826,985,000	702,816,000	0	702,816,000	84.99	124,169,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	5,727,060,000	9,247,045,000	8,538,871,437	0	8,538,871,437	92.34	708,173,563
	JUMLAH BELANJA	443,334,438,000	395,696,324,000	388,955,445,559	2,162,398,656	386,793,046,903	98.3	8,903,277,097

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 24/04/22 11:08
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,030,819,404	0	1,030,819,404	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	1,030,819,404	0	1,030,819,404	0
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	46,000,000	0	46,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	46,000,000	0	46,000,000	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	190,051	0	190,051	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	85,454,974	0	85,454,974	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	85,645,025	0	85,645,025	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	1,162,464,429	0	1,162,464,429	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	1,162,464,429	0	1,162,464,429	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 24/04/22 11:08
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,922,593,000	4,610,697,000	4,480,570,415	0	4,480,570,415	97.18	130,126,585
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,922,593,000	4,610,697,000	4,480,570,415	0	4,480,570,415	97.18	130,126,585
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,187,500,000	3,762,000,000	3,706,259,266	0	3,706,259,266	98.52	55,740,734
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,187,500,000	3,762,000,000	3,706,259,266	0	3,706,259,266	98.52	55,740,734
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	90,000,000	1,171,850,000	1,131,513,800	0	1,131,513,800	96.56	40,336,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	90,000,000	1,171,850,000	1,131,513,800	0	1,131,513,800	96.56	40,336,200
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,982,734,000	2,343,340,000	2,221,557,621	1,600,000	2,219,957,621	94.8	123,382,379
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,982,734,000	2,343,340,000	2,221,557,621	1,600,000	2,219,957,621	94.8	123,382,379
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	20,930,000	18,430,000	0	18,430,000	88.06	2,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	20,930,000	18,430,000	0	18,430,000	88.06	2,500,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,182,827,000	11,908,817,000	11,558,331,102	1,600,000	11,556,731,102	97.06	352,085,898
	JUMLAH BELANJA	6,182,827,000	11,908,817,000	11,558,331,102	1,600,000	11,556,731,102	97.06	352,085,898

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tanggal : 24/04/22 11:08 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_k3_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	224,657,448
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	48,981,400
117199	Persediaan Lainnya	196,130,663
132111	Peralatan dan Mesin	83,623,800,130
134113	Jaringan	2,092,285,347
135121	Aset Tetap Lainnya	547,639,287
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(64,799,286,588)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(857,736,919)
162151	Software	8,923,350,927
162161	Lisensi	105,187,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	4,702,348,710
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	8,442,256,015
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(4,702,348,710)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(6,966,686,602)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(68,371,875)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(7,483,026,015)
J U M L A H		24,029,180,718

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 24/04/22 11:09 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_k3_kl

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	9,195	78,465,371,778	930	15,941,383,035	629	10,782,954,683	9,496	83,623,800,130
30103	ALAT BANTU	29	1,355,787,104	19	1,335,727,804	11	1,297,263,804	37	1,394,251,104
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	22	4,365,832,500	15	3,538,444,000	15	3,538,444,000	22	4,365,832,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	21	43,786,255	0	0	1	65,105	20	43,721,150
30205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	10	24,317,400	0	0	0	0	10	24,317,400
30303	ALAT UKUR	11	62,608,940	0	0	0	0	11	62,608,940
30501	ALAT KANTOR	1,329	10,102,572,648	139	857,434,975	118	591,301,653	1,350	10,368,705,970
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,862	23,842,057,348	653	8,310,742,504	317	3,578,974,282	5,198	28,573,825,570
30601	ALAT STUDIO	359	5,211,984,348	36	453,387,026	10	131,398,712	385	5,533,972,662
30602	ALAT KOMUNIKASI	544	1,364,108,408	3	46,750,000	18	43,228,350	529	1,367,630,058
30603	PERALATAN PEMANCAR	7	71,227,200	0	0	0	0	7	71,227,200
30701	ALAT KEDOKTERAN	54	599,288,590	8	317,915,000	0	0	62	917,203,590
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	8	13,956,800	2	136,400,000	0	0	10	150,356,800
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	2	9,867,000	2	6,215,000	0	0	4	16,082,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	13,358,400	0	0	0	0	1	13,358,400
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	1	10,780,000	0	0	1	10,780,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	2,510,000	0	0	0	0	1	2,510,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	1,157	20,314,714,827	18	449,960,500	90	1,200,451,822	1,085	19,564,223,505
31002	PERALATAN KOMPUTER	775	11,034,304,010	34	477,626,226	49	401,826,955	760	11,110,103,281
31501	ALAT DETEKSI	1	22,000,000	0	0	0	0	1	22,000,000
31503	ALAT SAR	1	3,280,000	0	0	0	0	1	3,280,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	7,810,000	0	0	0	0	1	7,810,000
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0
134113	Jaringan	2	2,078,674,827	2	2,092,285,347	2	2,078,674,827	2	2,092,285,347
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	2,078,674,827	2	2,092,285,347	2	2,078,674,827	2	2,092,285,347
135111	Aset Tetap Renovasi	2	391,600,000	8	1,002,535,908	10	1,394,135,908	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	2	391,600,000	8	1,002,535,908	10	1,394,135,908	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	11	450,998,787	15	96,640,500	0	0	26	547,639,287
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	0	0	0	0	0	0
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	401,498,787	0	0	0	0	1	401,498,787
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	2	28,930,000	3	67,380,500	0	0	5	96,310,500
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	8	20,570,000	12	29,260,000	0	0	20	49,830,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 24/04/22 11:09 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_intra_k3_kl

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	747	9,646,100,004	539	6,570,821,813	1,265	11,514,573,107	21	4,702,348,710
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	40	7,074,550,990	15	3,538,444,000	36	6,071,539,990	19	4,541,455,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	4,617,250	1	65,105	3	4,682,355	0	0
30501	ALAT KANTOR	138	675,412,159	93	492,604,577	230	1,162,286,286	1	5,730,450
30502	ALAT RUMAH TANGGA	308	891,216,946	264	762,802,292	572	1,654,019,238	0	0
30601	ALAT STUDIO	21	161,182,375	10	131,398,712	31	292,581,087	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	9	25,592,630	18	43,228,350	27	68,820,980	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	38	496,608,405	90	1,200,451,822	128	1,697,060,227	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	26	253,847,324	48	401,826,955	73	500,511,019	1	155,163,260
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	90	23,286,300	0	0	90	23,286,300	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	75	39,785,625	0	0	75	39,785,625	0	0
TOTAL			91,032,745,396		25,703,666,603		25,770,338,525		90,966,073,474

DAFTAR KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PER 31 DESEMBER 2021

No	Nama Perkiraan	Saldo 31 Desember 2020	Mutasi Piutang 31 Desember 2021	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Penggolongan				Nilai Agunan atau Barang Sitaan
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
A.	PNBP	-	-	-	-				-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-	-	-				-
	1) Piutang Jangka Pendek								
	a. Piutang Bukan Pajak	-		-	-				-
	b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	-		-	-				-
	2) Piutang Jangka Panjang								
	a. Piutang Jangka Panjang Lainnya								
	b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Lainnya								
B.	Piutang Lainnya	558.674	88.011.564	88.570.238	88.570.238				
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Lainnya	(2.793)	(440.058)	(442.851)	(442.851)				
C.	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	46.000.000	(46.000.000)	-					
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(230.000)	230.000	-					
	Jumlah Total	46.558.674	42.011.564	88.570.238	88.570.238				
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(232.793)	(210.058)	(442.851)	(442.851)				

**NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (BA 035)
TAHUN 2021**

**YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2021 (AUDITED)**

Nomor : NKF-035/023/PB.6/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 April 2022, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak secara Online** untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam **Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA 035) Tahun 2021**, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas **Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA 035) Tahun 2021** dan untuk dikonsolidasikan dalam **LKPP Tahun 2021 (Audited)**.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2021 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam **Lampiran Nota Kesepakatan** ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara) **paling lambat tanggal 28 April 2022**.

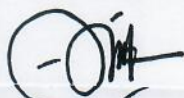
PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian



Akhmad Hisyam

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN



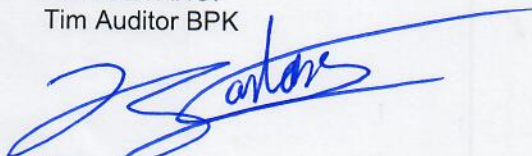
I Ketut Arimbawa

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP



Denny Febriano Singawiria

MENGETAHUI
Tim Auditor BPK



Hartono

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
A. PENDAPATAN

Kode Bagian Anggaran : 035
Uraian Bagian Anggaran : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 2-5+6	10 = 3-7+8	11 = 9-10
41. Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.162.464.429	-	1.162.464.429	-	-	-	-	1.162.464.429	-	1.162.464.429
421. Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422. Pendapatan dari KND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425. Pendapatan PNB Lainnya	1.162.464.429	-	1.162.464.429	-	-	-	-	1.162.464.429	-	1.162.464.429
424. Pendapatan BLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN	1.162.464.429	-	1.162.464.429	-	-	-	-	1.162.464.429	-	1.162.464.429

B. BELANJA

URAIAN		UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+6-7	11 = 4+8-9	12 = 10-9
51	Belanja Pegawai	105.442.338.453	49.975.737	105.392.362.716	-	-	-	-	105.442.338.453	49.975.737	105.392.362.716
52	Belanja Barang	274.974.235.669	2.112.422.919	272.861.812.750	-	-	-	-	274.974.235.669	2.112.422.919	272.861.812.750
53	Belanja Modal	8.538.871.437	-	8.538.871.437	-	-	-	-	8.538.871.437	-	8.538.871.437
54	Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Belanja Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BELANJA		388.955.445.559	2.162.398.656	386.793.046.903	-	-	-	-	388.955.445.559	2.162.398.656	386.793.046.903

KEMENTERIAN/LEMBAGA
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KEMENTERIAN KEUANGAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Wijaya Hsyim
NIP. 196501012006021005

Denny Febriano Singawirna

Hartono
KNA 21543

LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
 BA : 035

KEGIATAN OPERASIONAL	UNAUDITED	KOREKSI BPK DAN MANDIRI		KOREKSI UPDATE APLIKASI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
PENDAPATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN PERPAJAKAN						
Pendapatan Pajak Penghasilan	-					-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-					-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-					-
Pendapatan Cukai	-					-
Pendapatan Pajak Lainnya	-					-
Pendapatan Bea Masuk	-					-
Pendapatan Bea Keluar	-					-
Pendapatan Pajak Lain-lain	-					-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-					-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK						
Penerimaan Sumber Daya Alam	-					-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / KND	-					-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-					-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	-					-
PENDAPATAN HIBAH						
Pendapatan Hibah	-					-
Jumlah Pendapatan Hibah	-					-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL						
BEBAN OPERASIONAL						
Beban Pegawai	105.227.710.960					105.227.710.960
Beban Persediaan	4.802.198.318				69.958.824	4.732.239.494
Beban Barang dan Jasa	324.088.408.785		122.560.630			323.965.848.155
Beban Pemeliharaan	17.400.717.379		272.312.234		13.315.265	17.115.089.880
Beban Perjalanan Dinas	82.238.673.327					82.238.673.327
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.312.758.326					1.312.758.326
Beban Bunga	-					-
Beban Subsidi	-					-
Beban Hibah	-					-
Beban Bantuan Sosial	-					-
Beban Transfer	-					-
Beban Lain-lain	-					-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	10.165.504.993	87.077.047				10.252.582.040
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	210.058					210.058
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	545.236.182.146	87.077.047	394.872.864	-	83.274.089	544.845.112.240
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	545.236.182.146	87.077.047	394.872.864	-	83.274.089	544.845.112.240
KEGIATAN NON OPERASIONAL						
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR						
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.030.819.404					1.030.819.404
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	224.249.793					224.249.793
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	806.569.611					806.569.611
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-					-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-					-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-					-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA						
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8.911.951					8.911.951
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-					-
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8.911.951					8.911.951
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	815.481.562					815.481.562
POS LUAR BIASA						
Pendapatan Luar Biasa	-					-
Beban Luar Biasa	-					-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA						
SURPLUS/(DEFISIT) LO	544.420.700.584	87.077.047	394.872.864	-	83.274.089	544.029.630.678

Jakarta, April 2022
 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Akhmad Hisyam
 NIP 198501012006021005

Ditjen Kekayaan Negara

I Ketut Wirnawa
 NIP 196902241989121001



Badan Pemeriksa Keuangan

Hartono

RNA 215 43

Ditjen Perbendaharaan

Denny Febriano Singawiria

K/ : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

BA : 035

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED DARI BPK		KOREKSI AUDITED AKIBAT UPDATE APLIKASI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
EKUITAS AWAL	21.360.406.552					21.360.406.552
SURPLUS/DEFISIT LO	(544.420.700.584)	87.077.047	394.872.864		83.274.089	(544.029.630.678)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS						
Penyesuaian Nilai Aset	-					-
Koreksi Nilai Persediaan	-					-
Selisih Revaluasi Aset	-					-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(142.268.695)					(142.268.695)
Koreksi Atas Reklasifikasi	-					-
Koreksi Lain-lain	75.599.000					75.599.000
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	(66.669.695)	-	-	-	-	(66.669.695)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	541.852.008.100	-	-	-	-	541.852.008.100
Ditagikan ke Entitas Lain	386.793.046.903					386.793.046.903
Diterima dari Entitas Lain	(1.162.464.429)					(1.162.464.429)
Transfer Keluar	(1.538.316.673)					(1.538.316.673)
Transfer Masuk	-					-
Pengesahan Hibah Langsung	157.759.742.299					157.759.742.299
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-					-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-					-
Setoran Surplus BLU	-					-
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	(2.635.362.179)	87.077.047	394.872.864	-	83.274.089	(2.244.292.273)
EKUITAS AKHIR	18.725.044.373	87.077.047	394.872.864	-	83.274.089	19.116.114.279

Jakarta, April 2022

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Akhmad Hisyam

NIP 1985010120060210054

Ditjen Kekayaan Negara

Ketut Arimbawa

NIP 196902241989121001

Badan Pemeriksa Keuangan

Hartono

RNA 21543

Ditjen Perbendaharaan

Denny Febriano Singawiria

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
BA : 035

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED DARI BPK		KOREKSI AUDITED AKIBAT UPDATE APLIKASI		ASERSI FINAL
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Bendahara Pengeluaran	-					-
Kas di Bendahara Penerimaan	-					-
Kas Lainnya dan Setara kas	50.288.257					50.288.257
Kas pada BLU	-					-
Investasi Jangka Pendek BLU	-					-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-	102.210.630				102.210.630
Uang Muka Belanja (prepayment)	-					-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-					-
Piutang Perapakan	-					-
Penyisihan PTH-Piutang Perapakan	-					-
Piutang Perapakan (Netto)	-					-
Piutang Bukan Pajak	88.570.236	0	0	0	0	88.570.236
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	(442.851)					(442.851)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	88.127.387	0	0	0	0	88.127.387
Bagian Lancar TPA	-					-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	-					-
Bagian Lancar TPA (Netto)	-	0	0	0	0	-
Bagian Lancar TPITGR	-					-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPITGR	-					-
Bagian Lancar TPITGR (Netto)	-	0	0	0	0	-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	-					-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar PJPL	-					-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	0	0	0	0	-
Piutang dan Kewajiban BLU	-					-
Penyisihan PTH - Piutang dan Kewajiban BLU	-					-
Piutang dan Kewajiban BLU (Netto)	-	0	0	0	0	-
Persediaan	386.495.422			83.274.089		469.769.511
Jumlah Aset Lancar	524.911.066	102.210.630	-	83.274.089	-	710.385.785
ASET TETAP						
Tanah	-					-
Peralatan dan Mesin	83.342.631.492	279.951.714		2.116.924		83.623.800.130
Gedung dan Bangunan	-					-
Jalan, Jembatan, dan Jangkar	2.078.674.827	13.610.520				2.092.285.347
Aset Tetap Lainnya	547.639.287					547.639.287
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-					-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(64.710.376.170)		87.077.047		2.116.924	(64.798.570.141)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-					-
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, dan Jangkar	(857.453.366)					(857.453.366)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-					-
Jumlah Aset Tetap	20.401.116.070	292.662.234	87.077.047	2.116.924	2.116.924	20.606.791.257
PIUTANG JANGKA PANJANG						
Tagihan Penjualan Angsuran	-					-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-					-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-					-
Tagihan TPITuntutan Ganti Rugi	-		0	0	0	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPITGR	-					-
Tagihan TPITuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	0	0	0	0	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (PJPL)	-					-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PJPL	-					-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	0	0	0	0	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA						
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-					-
Aset Tak Berwujud	9.028.538.427					9.028.538.427
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	-					-
Dana Penanaman	-					-
Dana Kelolaan BLU	-					-
Aset Lain-lain	13.144.604.725					13.144.604.725
Akum. Penyusutan Kemitraan Dg Pihak Ke3	-					-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	(4.702.348.710)					(4.702.348.710)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(7.035.058.477)					(7.035.058.477)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	(7.483.026.015)					(7.483.026.015)
Jumlah Aset Lainnya	2.852.709.950	-	-	-	-	(7.483.026.015)
JUMLAH ASET	23.878.737.086	394.872.864	87.077.047	85.391.013	2.116.924	24.269.806.992
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang kepada Pihak Ketiga	5.149.007.713					5.149.007.713
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-					-
Utang Kewajiban Pembayaran Pendapatan	-					-
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.685.000					4.685.000
Utang Muka dari KPPN	-	0	0	0	0	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-					-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.153.692.713	-	-	-	-	5.153.692.713
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-					-
Utang Jangka Panjang BLU kepada SUN	-					-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	5.153.692.713	-	-	-	-	5.153.692.713
EKUITAS	18.725.644.373	87.077.047	394.872.864	83.274.089	-	19.116.114.279
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	23.878.737.086	87.077.047	394.872.864	83.274.089	-	24.269.806.992

Jakarta, April 2022
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Akhmad Hidayat
NIP. 19650101200201005
Ditjen Kekayaan Negara
Ket. Arimawa
NIP. 196902241989121001

Badan Pemeriksa Keuangan

Hartono
RNA 21543
Ditjen Perencanaan

Denny Febriano Singawirna

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Ali Wardhana
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat
Kode Pos 10710
Telp : (021) 3522003
Fax : (021) 3511467
Web : www.ekon.go.id

